

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis, maka disimpulkan bahwa :

1. Hasil analisis regresi memperlihatkan bahwa antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah terdapat hubungan yang berbanding lurus dimana apabila Pendapatan Asli Daerah mengalami peningkatan pada saat Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus tidak mengalami perubahan, maka Belanja Daerah akan meningkat. Begitupun sebaliknya dengan Dana Alokasi umum dan Dana Alokasi khusus yang juga memiliki hubungan dengan Belanja Daerah.
2. Pendapatan Asli Daerah memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Jawa Barat. Artinya masing-masing daerah dapat menggali sumber-sumber penerimaan lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Penggalan sumber-sumber penerimaan ini dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Dana Alokasi Umum memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Jawa Barat. Tujuan pengalokasian DAU ini selain memang dalam kerangka otonomi pemerintahan di tingkat daerah, juga memiliki tujuan lain, salah satu tujuan penting pengalokasian DAU ini adalah dalam kerangka pemerataan kemampuan penyediaan pelayanan publik diantara pemerintah daerah di Indonesia.
4. Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah Jawa Barat. DAK dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, (pelayanan dasar dan pelayanan rujukan), jalan, irigasi, air minum, sanitasi, prasarana pemerintahan, kelautan,

perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, sarana dan prasarana perdesaan, serta perdagangan.

5.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis mengajukan saran-saran dengan harapan dapat memberikan manfaat dalam membantu memberikan alternatif pemecahan atau mengatasi masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat hendaknya mengoptimalkan upayanya dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, baik berdasarkan program intensifikasi maupun program ekstensifikasi, dengan jalan :
  - a. Meningkatkan mutu yang berhubungan dengan sumber daya manusia yang memiliki hubungan dengan Pendapatan Asli Daerah. Peningkatan tersebut dapat dilakukan dengan cara adanya pengembangan para pegawai negeri baik dengan pelatihan yang diadakan oleh pemerintah pusat maupun daerah atau dengan jalan mengikutsertakan para pegawai negeri pada pelatihan yang diadakan oleh pihak swasta yang ditunjuk.
  - b. Memperluas dan mengembangkan aktivitas ekonomi yang menunjang pengembangan lembaga ekonomi. Disadari maupun tidak masih terdapat potensi pemasukan pendapatan asli daerah diluar yang selama ini sudah didapatkan, oleh karena itu hendaknya ada program kerja yang menyeluruh dari pusat hingga daerah.
  - c. Terus melakukan pencapaian dan penggalan sumber pendapatan baru, khususnya pengembangan dari urusan-urusan rumah tangga yang sudah ada. Seperti yang sudah dijelaskan pada point yang pertama, hingga dapat diketahui sektor mana yang dapat lebih ditekan untuk menambah pendapatan asli daerah. Serta dengan melakukan kerjasama dengan unsur terkait seperti misalnya dengan dinas perhubungan untuk lebih intensif didalam penanganan pajak kendaraan.

- d. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Daerah, maka sebaiknya Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melaksanakan pembaharuan dan penyempurnaan beberapa peraturan daerah yang mengatur Pajak Daerah yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, mengingat Pajak Daerah merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat diandalkan. Dengan banyaknya sektor-sektor yang mengalami kebocoran, maka hendaknya dilakukan perbaikan yang didukung dengan keputusan pemerintah pusat melalui SK Gubernur untuk mengatur setiap penerimaan pajak yang disesuaikan untuk setiap wilayah.
2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi Jawa Barat hendaknya memberikan kewenangan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam hal penyelenggaraan urusan rumah tangganya dan dalam hal penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah dengan memperhatikan kondisi dan potensi sumber daya Provinsi Jawa Barat yang masih melimpah. hal ini disebabkan kurangnya usaha yang dilakukan pemerintah dalam menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, disamping itu Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga kurang ketat dan teliti dalam melakukan pemungutan untuk Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Laba Badan Usaha Milik Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebagai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu perlu ditingkatkan lagi melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi guna memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.